



Pesawat terbang Jeju Air Boeing 737-800.

KR-Antara/HO-BP Batam

USAI KECELAKAAN PESAWAT JEJU AIR Korsel Inspeksi Semua Boeing 737-800

SEOUL (KR) - Kementerian Transportasi Korea Selatan (Korsel) akan menginspeksi semua pesawat Boeing 737-800 di negara itu pascaterjadinya kecelakaan pesawat Jeju Air 7C 2216 pada Minggu (29/12). Tipe pesawat B737-800 sebagian besar dioperasikan oleh maskapai penerbangan domestik berbiaya rendah (low-cost). Di antara maskapai penerbangan itu, Jeju Air memiliki jumlah pesawat B737-800 terbanyak, yakni 39 unit yang sedang beroperasi.

Angka itu diikuti oleh 27 unit milik T'way Air, 19 unit milik Jin Air, 10 unit milik Eastar Jet, empat unit milik Air Incheon, dan dua unit milik Korean Air. Pesawat B737-800 milik Jeju Air mengalami kecelakaan saat mendarat di Bandar Udara Internasional Muan, yang terletak sekitar 290 km di sebelah barat daya Seoul. Diduga karena roda pendarat yang tidak berfungsi, pesawat itu mendarat tanpa roda, tergelincir dari landasan pacu dan menghantam dinding luar landasan pacu. Badan pesawat itu kemudian patah menjadi dua dan terbakar.

Belum lagi penyelidikan atas kecelakaan itu dilakukan, sebuah pesawat Jeju Air yang sedang terbang di Korea Selatan pada Senin (30/12) terpaksa putar balik ke bandara asalnya. Hal itu dikarenakan masalah roda pendaratan, yakni isu yang juga ditemukan pada ke-

celakaan fatal pesawat model serupa sehari sebelumnya.

Jeju Air menyampaikan bahwa penerbangan Jeju Air 7C101, yang lepas landas dari Bandara Internasional Gimpo menuju Jeju pada Senin pukul 06.37 waktu setempat, terdeteksi mengalami masalah pada roda pendaratan tak lama setelah lepas landas. Maskapai tersebut menginformasikan kepada 161 penumpang pesawat tentang kerusakan mekanis yang disebabkan oleh masalah roda pendaratan, dan kemudian memutuskan untuk kembali ke Gimpo pada pukul 07.25.

Para penumpang dipindahkan ke pesawat alternatif dengan model pesawat yang sama, yaitu Boeing B737-800, dan berangkat menuju Jeju pukul 08.30. Namun, 21 penumpang memilih untuk tidak naik pesawat kembali karena mengkhawatirkan keselamatan. Menurut Song Kyung-hoon, Kepala Kantor Dukungan Manajemen Jeju Air, kapten penerbangan tersebut menghubungi pusat kontrol di darat setelah mendeteksi sinyal yang menunjukkan adanya masalah pada roda pendaratan. "Meski roda pendaratan telah dipastikan berfungsi normal setelah tindakan tambahan, kapten memutuskan untuk kembali ke bandara untuk pemeriksaan keselamatan," kata Song pada konferensi pers. (Ant/Has)-d

PRESIDEN INGATKAN PUSAT DAN DAERAH 'Mark Up' Anggaran Harus Diberantas

JAKARTA (KR) - Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jajaran pejabat pemerintah di pusat dan daerah untuk memberantas praktik-praktik penggelembungan (*mark up*) anggaran, karena itu bagian dari tindak pidana korupsi.

Dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, Senin (30/12), Presiden menyebutkan langkah-langkah pencegahan saat ini telah diterapkan untuk mencegah *mark up* itu, di antaranya program-program digitalisasi dalam pengadaan seperti e-catalog, e-government dan govtech.

"Untuk seluruh aparat, budaya *mark up*, penggelembungan (nilai) barang, proyek dan anggaran itu adalah korupsi. Itu adalah merampok uang rakyat. Kalau bikin proyek Rp 100 juta, ya Rp 100 juta. Bikin rumah Rp 100 juta, ya Rp 100 juta. Jangan bilang Rp 150 juta," ucap Presiden Prabowo.

Presiden melanjutkan, aksi *mark up* nilai proyek dan pengadaan itu yang menyebabkan kebocoran APBN. Prabowo pun memerintahkan seluruh pihak, termasuk kalangan eksekutif di pemerintahan, legislatif

dan yudikatif bergotong-royong memberantas kebiasaan *mark up* tersebut. "Kita sekarang ingin melaksanakan pembangunan nasional dengan mengurangi segala bentuk kebocoran, manipulasi dan *mark up* dan ini membutuhkan semua pihak, yudikatif, legislatif dan aparat," tegasnya.

Terkait jumlahnya, Presiden menyebutkan akan mengungkap nilai kebocoran anggaran itu dalam kesempatan yang lain. Jika perlu, Presiden melanjutkan, ia akan mengungkap itu dalam sidang kabinet. "Kalau perlu di sidang kabinet nanti, khusus mungkin bupati, gubernur saya undang khusus," ujarnya.

Presiden Prabowo memberikan pengarahannya dalam Musrenbangnas untuk Pelaksanaan RPJMN 2025-2029 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, kemarin. Kegiatan yang digelar secara langsung dan melalui sambungan video conference ini, dihadiri seluruh petinggi pemerintah pusat dan kepala daerah se-Indonesia.

Di lokasi acara, beberapa pejabat negara mendengar langsung arahan-arahan Presiden. (Ant/Obi)-d

AKHIR TAHUN, POLRI MUTASI BESAR-BESARAN Kapolrestabes Semarang Kena Rotasi

JAKARTA (KR) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan mutasi terhadap 734 personel di tingkat perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen). Termasuk di dalamnya sejumlah personel kepolisian daerah (polda) dan kepolisian resor (polres).

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya di Jakarta, Senin (30/12) mengatakan, mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram (ST) resmi bernomor ST/2775/KEP.2024, ST/2776/KEP.2024, ST/2777/KEP.2024, dan ST/2778/KEP.2024. Surat itu dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Irwasum Polri Komjen Pol Dedi Prasetyo.

Sejumlah personel yang dimutasi itu di antaranya adalah Irjen Pol Suharyono yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat, dimutasikan menjadi Pati Polda Sumbar dalam rangka pensiun. Jabatan Kapolda Sumbar kemudian digantikan oleh Brigjen Pol Gatot Tri Suryanta yang sebelumnya menjabat sebagai Irwil V Itwasum Polri.

Lalu, Brigjen Pol Kasihan Rahmadi yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Riau, dimutasikan menjadi Wakapolda

Jawa Barat. Posisi Wakapolda Riau yang kosong pun diisi oleh Brigjen Pol Adrianto Jossy Kusumo yang sebelumnya menjabat sebagai Dirlitandus 88 Antiteror Polri.

Selanjutnya, Kombes Pol Irwan Anwar yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolrestabes Semarang dimutasikan menjadi Kalemkonproppol Waketbidkermadianmas STIK Lemdiklat Polri. Posisi Kapolrestabes Semarang pun diisi oleh Kombes Pol M Syahduddi yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat di lingkungan Polda Metro Jaya.

Kemudian Wakapolresta Surakarta AKBP Catur Cahyono Wibowo menjalani mutasi menjadi Kapolresta Surakarta, dan posisi yang ia tinggalkan digantikan oleh AKBP Sigit yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Sukoharjo. Berikutnya ada AKBP Danang Setiyo Pambudi Sukarno yang dimutasikan menjadi Kapolres Malang dari jabatan sebelumnya sebagai Kapolres Blitar Kota. Danang menggantikan AKBP Putu Kholis Aryana yang dimutasi menjadi Wadirreskrimum Polda Metro Jaya. Jabatan Kapolres Blitar Kota yang kosong pun diisi oleh AKBP Titus Yudho Uly yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit 3 Ditreskrimum Polda Metro Jaya. (Ant/Has)-d

BANK  BPD DIY

Selamat dan Sukses

Atas Dilantiknya
Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc.

Sebagai

Rektor

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Periode 2024-2028

Semoga amanah dan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta semakin maju.



Call Center
1500061

Bank BPD DIY
bpddiy

www.bpddiy.co.id

Bank BPD DIY Berijin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia Serta Merupakan Peserta Permainan LPS

SENILAI RP 8,9 MILIAR

BPOM Sita Ratusan Kosmetik Impor Ilegal

JAKARTA (KR) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menyita ratusan jenis kosmetik impor ilegal dan mengandung bahan berbahaya yang beredar di Pulau Jawa dengan nilai putaran ekonominya mencapai Rp 8,9 miliar.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, dalam operasi penindakan yang dilakukan Tim Gabungan pada periode Oktober-November 2024 total ada 235 jenis kosmetik dari sejumlah kota besar di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

"Barang disita untuk dimusnahkan dan juga kami lakukan penindakan secara hukum bersama Kepolisian, yang mayoritas mereka adalah distributor hingga pelaku usaha yang menggunakan kosmetik ini dan atau memasarkannya secara ilegal," kata Taruna Ikrar di Jakarta, Senin (30/12) sore.

Taruna Ikrar menjelaskan, ratusan produk kosmetik yang disita itu meru-

pakannya produk impor yang masuk ke Indonesia secara ilegal, dan mayoritas juga mengandung bahan baku berbahaya bagi kesehatan kulit seperti merkuri, rhodamin B, hidrokinon, tretinoin dan sejenisnya.

Adapun kosmetik yang disita petugas gabungan itu bermerek dagang LAMEILA, AICHUN BEAUTY, WN-PL, MILA COLOR, 2099, XIXI, JIOPOIAN, SVMY, TANAKO, dan ANYLADY.

Berdasarkan hasil investigasi Tim BPOM diketahui merek kosmetik yang disita ini berasal dari China, Korea Selatan, India, Malaysia, Thailand, dan Filipina, yang masuk secara ilegal ke Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan 'tikus' dan pemesanan melalui media sosial oleh sejumlah masyarakat yang juga pelaku usaha salon kecantikan.

"Ya benar, didominasi produk impor yang juga dipasarkan melalui media sosial. Beberapa meski masuk secara

impor (legal) tapi operasinya secara ilegal karena tidak memiliki izin resmi untuk dipasarkan," katanya seraya menambahkan, penemuan kosmetik ilegal selama periode Oktober-November 2024 itu paling banyak di Solo, Semarang, Bandung, dan Cimahi dengan putaran ekonomi senilai Rp 4,9 miliar.

BPOM berkomitmen untuk memutus mata rantai peredaran kosmetik terlarang seperti ini mulai dari hulu ke hilir bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan melalui Bea-Cukai, hingga Bareskrim Polri tanpa pandang bulu.

Ikrar menyebutkan, hal ini dilakukan karena bukan hanya mengancam kesehatan masyarakat tetapi juga dapat menimbulkan persaingan bisnis yang tidak sehat antarpelaku usaha bidang kosmetik/kecantikan di Indonesia hingga terjadinya kebocoran pendapatan bagi negara dari aktivitas perdagangan kosmetik. (Ant/San)-d

AGAMA SEHARUSNYA JADI KANOPI SUCI

KPK Jangan Terperangkap Politisasi

YOGYA (KR) - Muhammadiyah berharap usaha penegakan hukum menjadi langkah politik yang kuat dari seluruh institusi penegakan hukum seperti Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Kejaksaan, Kepolisian dan institusi pemerintahan secara keseluruhan.

Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menegakkan fungsi pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih dan terperangkap politisasi. "KPK harus dapat bekerja secara objektif tanpa terpengaruh pihak manapun," tandas Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam Refleksi Akhir Tahun 2024 di Kantor PP



KR-Fadmi Sustiti

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (kanan) menyampaikan refleksi Muhammadiyah.

Muhammadiyah di Jalan Cik Ditiro, Senin (30/12).

Haedar didampingi pengurus PP yang lain yakni Agung Danarto, Agus Taufiqurrahman, M Sayuti dan Syamsul Anwar. Refleksi membahas lima hal yakni

agama dan moral, KPK dan penegakan hukum, penegakan demokrasi, Pilkada 2024 dan kebijakan pro-rakyat.

Haedar mendukung langkah pemerintah sukses Presiden Prabowo un-

tuk pemberantasan korupsi. Untuk itu Muhammadiyah meminta seluruh institusi pemerintah khususnya penegakan hukum, harus menjadikan upaya itu sebagai *political will*.

"Komitmen dalam upaya memberantas korupsi saja tidak cukup, mesti ada kemauan besar dalam mewujudkan komitmen tersebut. Jadikan ini sebagai *starting point* di tahun 2025 untuk berkomitmen dalam pemberantasan korupsi dan menjadi *political will* dalam seluruh institusi pemerintahan, baik di eksekutif, legislatif, yudikatif kemudian lembaga-lembaga, bahkan sampai ke pemerintah daerah," katanya. (Fsy)-d